

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- Brotodihardjo, R Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Djafar Saidi, Muhammad, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Ilyas, Wirawan B & Richard Burton, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Salemba Empat, Jakarta, 2013.
- Ismail, Tjip, *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*, Yellow Mediatama, Jakarta, 2005.
- Kartasapoetra, G, Komaruddin, E, Kartasapoetra, Rience G, *Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan pelaksanaannya*, Bina Aksara, Jakarta, 1989.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Rusdji, Muhammad *PBB, BPHTB, & Bea Meterai*, Indeks, 2008.
- Siahaan, Marihot Pahala, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soemitro, Rochmat, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Eresco, Bandung, 1986.
- , *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung, 1988.
- Sutanto, Paojan Mas'ud, *Perpajakan Indonesia (Teori dan Aplikasi)*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Sutrisno, Deddy & Indrawati, *Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Pajak*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2009.
- Tim Penyusun Direktorat Jenderal Pajak dan Yayasan Bina Pembangunan, *Buku Panduan Pajak Bumi dan Bangunan*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1992.

## **KAMUS**

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 01);

Peraturan Menteri Keuangan No 34/PMK.03/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

Peraturan Bersama Menteri Keuangan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;

Peraturan Bupati Nomor 188/2.10/404.012/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Peraturan Bupati Nomor 3.11 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

#### **WAWANCARA**

Wawancara dengan Bapak Agus Setyo Budi selaku Kepala Bidang PBB-P2 DPPKA Kab. Ngawi, 2015.

#### **WEBSITE**

Direktorat penyuluhan, pelayanan, dan hubungan masyarakat, “pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah”, <[www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan](http://www.pajak.go.id/content/pengalihan-pbb-perdesaan-dan-perkotaan)>, diunduh 7 Oktober 2015.